KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KASUS KEWARGANEGARAAN GANDA

Nama : Adriani

Nim : 10200120154

Abstrack

Masing-masing negara mengikuti alasan-alasan mereka sendiri dalam menetapkan kriteria mereka untuk kewarganegaraan. Setiap negara memiliki persyaratan berbeda mengenai kewarganegaraan serta kebijakan berbeda mengenai kewarganegaraan ganda. hukum-hukum tersebut kadang meninggalkan celah yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa menghapus kewarganegaraan asli, sehingga menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memiliki dua kewarganegaraan atau lebih. Mengenai sistem kewarganegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia.

A. Pendahuluan

a. Latar belakang masalah

Mahkamah konstitusi memastikan akan menerima dan memproses gugatan yang dilayangkan pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada kabupaten sabu rajua Nusa tenggara timur. Sebelumnya, paslon nomor urut 1 nikodemus N Ribu Heke-yohanis yly kale, diwakili kuasa hukumnya mendatangi MK untuk menyerahkan gugatan sengketa pilkada terkait polemik kewarganegaraan Bupati terpilih orient Riwu kore. meski pendaftaran gugatan sengketa pemilu sudah terlambat tim kuasa hukum berharap MK dapat mempertimbangkan kasus tersebut mengingat ada dugaan pelanggaran berat terkait kewarganegaraan orient yang baru terungkap awal Februari 2021.

mahkamahmahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.mahkamah konstitusi republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung.

kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara saat di beberapa negara.kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif.

Pesatnya arus pergerakan orang antar negara untuk berbagai urusan mengakibatkan perkawinan campur menjadi tak terelakkan. Mulai dari urusan sekolah bekerja atau hanya sekedar berwisata. Bahkan hanya dengan sekedar berwisata ke negara yang menganut asas kewarganegaraan bisa mengakibatkan

¹ Hukum online

anak yang lahir di negara tersebut langsung memperoleh kewarganegaraan di situ hal ini lazim terjadi di Amerika Serikat, di Indonesia sendiri nyatanya kewarganegaraan seseorang tidak hanya diakui semata-mata berdasarkan darah keturunan saja merujuk penjelasan umum UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, Indonesia menganut sedikitnya empat asas kewarganegaraan. kendati masih memungkinkan bagi anak-anak untuk memiliki dua kewarganegaraan namun dapat diperhatikan itu masih tergolong sebagai suatu pengecualian. kemudian terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi salah satu Bupati terpilih Nusa Tenggara Timur yang terbukti memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

b. Rumusan masalah

1. Apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi ?
2. apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ganda dan apakah Indonesia memperbolehkan sistem kewarganegaraan ganda?
3. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus Bupati terpilih Nusa Tenggara Timur yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda?

B. Metode penelitian

studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan terpublikasikan, buku teks, surat kabar, artikel dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang mencari Tuhan di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.

C. Pembahasan

1.) Mahkamah konstitusi

mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945. pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah agung kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dengan demikian mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945.

Visi dari MK adalah “mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya.” sedangkan misi yang dimilikinya adalah membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

Berdirinya mahkamah konstitusi republik Indonesia diawali dengan diadopsinya ide MK (constitutional court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 pasal 24c, dan pasal 7B undang-undang dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan mahkamah konstitusi MPR menetapkan mahkamah agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat DPR kemudian pemerintah membuat rancangan undang-undang mengenai mahkamah konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama UU nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316) lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan undang-undang dasar 1945.²

Berdasarkan pasal 24c ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan D UU 24/2003, kewenangan mahkamah konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945 memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban mahkamah konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945.

Kewenangan mahkamah konstitusi

Negara Indonesia menganut sistem konstitusi dalam arti bahwa konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang karena itu secara materiil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat diajukan ke mahkamah konstitusi untuk diuji.

Dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah agung oleh karena itu selain kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mahkamah konstitusi juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 24c ayat 1 kewenangan lainnya tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya

² Mkri.id

pada ayat 2 dinyatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenangan bersifat wajib yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar

Mahkamah konstitusi RI mempunyai empat kewenangan, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusi oleh karena itu UUD 1945 berlaku sebagai hukum tertinggi dan semua norma hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma UUD 1945 tersebut. Karena itu jika terdapat ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ia harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum sehubungan dengan itu maka lembaga yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang adalah mahkamah konstitusi republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 24c ayat 1 undang-undang dasar 1945.³
- memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD negara republik Indonesia tahun 1945
UUD 1945 menetapkan 8 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 lembaga negara dimaksud ialah majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan daerah, badan pemeriksa keuangan, mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi mahkamah konstitusi RI adalah juga sebagai penafsir konstitusi oleh karena itu jika terdapat lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diperoleh berdasarkan konstitusi bersengketa perihal kewenangannya maka mahkamah konstitusi yang berwenang untuk mengadili dan memutuskannya kewenangan tersebut diatur dalam pasal 24c ayat 1 UUD 1945
- Memutuskan pembubaran partai politik
pasal 28 UUD 1945 menentukan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam organisasi partai politik. dalam pasal 1 UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. suatu partai politik dapat dibubarkan oleh

mahkamah konstitusi apabila melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU tentang partai politik yaitu :

- 1). Larangan soal nama, lambang, & gambar yang sama
- 2). larangan bila bertentangan dengan UUD dan peraturan per UU lain membahayakan NKRI bertentangan dengan upaya persahabatan dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
- 3). larangan soal menerima atau memberi pihak asing sumbangan yang bertentangan dengan peraturan per UU menerima sumbangan tanpa identitas meminta atau menerima sumbangan dari BUMN BUMD koperasi yayasan LSM ormas dan organisasi kemanusiaan.
- 4). Larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha dan larangan menganut mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme.

- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
paham negara hukum Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila memuat pemajuan hak-hak asasi manusia pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. pemilihan umum juga merupakan implementasi prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang Rawang perbedaan atau bahkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diberi kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24c ayat 1 UUD 1945⁴

5

Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2015 mkri memiliki kewenangan tambahan memutuskan perselisihan hasil pemilu gubernur, bupati dan walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

Kewajiban mahkamah konstitusi

mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran.

2.) Kewarganegaraan ganda

kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda tetapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. karena itu mungkin saja bagi seseorang menjadi warga negara di 1 negara atau lebih atau bahkan tanpa kewarganegaraan.

Warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dengan memiliki status kewarganegaraan seorang individu diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya dimana pengakuan negara tersebut merupakan sebuah hubungan hukum antara dua pihak tersebut yaitu individu dan negara yang mengakuinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui status kewarganegaraan tersebut individu bisa menikmati banyak manfaat baik dari hukum nasional maupun internasional. Untuk dapat menikmati apa yang disebut sebagai hak asasi manusia yang universal seorang individu harus menikmati hak atas kewarganegaraan terlebih dahulu, yaitu status kewarganegaraan yang formal dan komplit setidaknya di suatu negara jika seorang mempunyai kewarganegaraan di suatu negara, orang tersebut mempunyai hak untuk tinggal, bekerja, memilih dan melakukan perjalanan di negara tersebut namun disisi lain adalah merupakan hak suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional. Pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pasal 28d ayat 4 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” sedangkan menurut pasal 26 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 “ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dari pasal tersebut terlihat bahwa UUD NRI tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang. Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan tetapi juga termaksud hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan. UUD NRI tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD NRI tahun 1945 yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena UUD NRI tahun 1945 sudah memberi jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda UUD NRI tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3, bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** Saat ini undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. **Pada dasarnya UUD nomor 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianut dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini.** Namun, UU nomor 12 tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini diantaranya adalah anak-anak yang memiliki orang tua dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah WNI. Kasus tersebut merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak.

Sejak proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ihwal kewarganegaraan diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 1947 tentang perubahan undang-undang nomor 3 tahun 1946 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang nomor 11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat undang-undang dasar sebagaimana tersebut di atas undang-undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini sebagai berikut :

- Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- Asas ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3.) Kewenangan mahkamah konstitusi terkait kasus kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Nusa tenggara timur

Bupati terpilih kabupaten sabu rajua Nusa tenggara timur orient patriot Riwu kore, diketahui merupakan warga negara Amerika serikat. ungkap setelah Bawaslu kabupaten sabu rajua menerima balasan surat elektronik dari Kedubes Amerika serikat mengenai status kewarganegaraan orient patriot sejak 1 Februari 2021.

Terpilihnya orient sebagai bupati sabu rajua dalam pilkada 2020 lalu menimbulkan pertanyaan mengapa dugaan kepemilikan kewarganegaraan asing tidak terpantau selama proses pencalonan seorang calon kepala daerah. Kepala kanwil Kemenkumham NTT, marsiana Dominika jone, menyatakan pihaknya belum pernah sekali pun mengeluarkan data kewarganegaraan calon Bupati sabu rajua baik sejak awal pencalonan kepala daerah pada September 2020 lalu hingga muncul polemik kewarganegaraan ganda orient. Selaku pengawas pelaksanaan Pilkada Bawaslu mengklaim telah menjalankan fungsi pengawasan sejak awal tahap pencalonan.

status kewarganegaraan Bupati sabu rajua terpilih orient patriot Riwu kore diketahui memiliki paspor Amerika serikat. namun ia juga tercatat sebagai warga

negara Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan e-KTP. berkaca dari kasus tersebut guru besar hukum internasional universitas Indonesia hikmahanto Juwana mengungkapkan seorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda sementara apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain statusnya sebagai WNI akan gugur. dalam pasal 23 huruf a uu kewarganegaraan salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri dan Arif fakrulloh mengatakan sebenarnya orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997. namun orient ternyata diketahui memiliki dua paspor yakni paspor Amerika serikat dan paspor Indonesia yang dikeluarkan pada April 2019. sementara kepemilikan paspor Amerika serikat lanjut Sudan berdasarkan pengakuan orang yang dibuat tanpa melepaskan status WNI.

Bantah kecolongan ketua badan pengawas pemilu membantah pihaknya kecolongan atas munculnya kasus dugaan kewarganegaraan Bupati sabu raijua terpilih orient p Riwu kore. ia menegaskan bahwa seluruh sabu raijua telah meminta kepada KPU sabu raijua untuk memeriksa keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati sejak 5 September 2020. pada saat yang sama Bawaslu juga melayangkan surat kepada kepala kantor imigrasi provinsi NTT untuk meminta data kewarganegaraan dari bakal calon bupati dan wakil bupati sabu raijua. Permintaan itu sempat dijawab melalui surat yang menjelaskan bahwa calon bupati dan wakil bupati sabu raijua adalah benar warga negara Indonesia. Namun surat tersebut ditarik lagi oleh kantor imigrasi kelas I TPI pada 5 September 2020 dengan alasan kantor imigrasi masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari calon Bupati atas nama orient patriot Riwu kore. selanjutnya pada 10 September Bawaslu menyurati kedutaan Amerika serikat untuk membantu mengecek status kewarganegaraan orient. Bawaslu juga mengirimkan surat kepada direktorat lalu-lintas keimigrasian perihal permintaan data kewarganegaraan namun hingga saat ini belum ada jawaban. setelah itu pada 15 September Bawaslu kembali mengirimkan surat kepada direktur jenderal administrasi hukum dan umum dan kementerian Hukum dan hak asasi manusia perihal permohonan informasi data kewarganegaraan namun hingga kini belum ada jawaban lalu mengirimkan kembali surat direktorat lalu lintas ke imigrasian perihal permintaan bantuan mengecek serta keterangan terkait status kewarganegaraan dari orient. 21 Oktober Bawaslu kembali mengirimkan surat ke direktorat administrasi hukum umum Kemenkumham perihal permintaan kerjasama untuk memeriksa status kewarganegaraan orient. sementara pada 18 November Bawaslu sabu raijua kembali surat kepada direktur sistem teknologi informasi ke migrasi and namun belum ada jawaban. Pada 9 Januari ketua Bawaslu sabu raijua, Yudi tagih Huma, juga melakukan percakapan bersama kedutaan besar Amerika serikat melalui email terkait data kewarganegaraan orient. tanggal 22 Januari kedutaan besar Amerika menjawab email dari Yudi dan menyatakan bahwa orient adalah warga negara Amerika serikat. Sedangkan pada 2 Februari kedua tahan Amerika serikat menjawab surat yang dikirim kan Bawaslu sabu raijua secara resmi dan menyatakan orient adalah warga negara Amerika serikat.

Keputusan mahkamah konstitusi terkait kasus tersebut

putusan MK terhadap perselisihan hasil Pilkada di daerah tersebut menjawab persoalan yang mengapung sejak Januari 2020 lalu. Setelah menjalani rangkaian persidangan, mendengar, keterangan para pihak, saksi, serta instansi yang berwenang terkait kependudukan dan migrasi and mahkamah memutuskan bahwa orient Riwu kore, calon kepala daerah yang meraih suara terbanyak di Pilkada kab.sabu raijua NTT dinyatakan masih berstatus warga negara Amerika serikat. atas status kewarganegaraannya tersebut MK memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat fundamental sebagai calon kepala daerah yakni warga negara Indonesia. di dalam putusannya MK mengatakan bahwa kasus Pilkada kabupaten sabu raijua memiliki kejadian spesifik, yang tidak bisa hanya berpedoman pada ketentuan normatif saja. Satu hal yang prinsip menurut MK tidak mungkin warga negara asing bisa menjadi calon kepala daerah apalagi dilantik menjadi Bupati. Meskipun berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa memang **penyelenggara pemilu** bapak baru mengetahui orient memiliki kewarganegaraan Amerika serikat setelah yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. konfirmasinya adalah surat dari kedutaan besar Amerika serikat di Jakarta. di dalam persidangan juga terungkap, bahwa orient Riwu kore tidak jujur terkait status kewarganegaraannya. iya tidak jujur kepada konsulat jenderal republik Indonesia di los angeles pada saat meminta surat perjalanan laksana paspor, yang akan ia pergunakan untuk mengurus paspor Indonesia yang berlaku dari tahun 2019 sampai 2024. padahal ketika ia mengurus paspor Indonesia tersebut yang bersangkutan sudah memegang paspor Amerika serikat yang berlaku sejak tahun 2017 sampai 2027. ketidakjujuran berlanjut ketika ia mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 pada September 2020. **atas rangkaian fakta tersebut MK memutuskan untuk mendiskualifikasi orient Riwu kore beserta calon wakil bupati nya, dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kabupaten sabu raijua NTT.**⁶

D. Kesimpulan

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. Pada dasarnya UU nomor 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang.

E. Daftar pustaka

Hukumonline.com

www.mkri.id

Indonesiabaik.id “*mengenal kewenangan dan kewajiban mahkamah konstitusi*”

News.unair.ac.id “*kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia*”

Id.m.wikipedia” *kewarganegaraan ganda*”

Kompas.com “*menyoal status kewarganegaraan ganda Bupati sabu raijua terpilih*”

Perludem.org “*akhir polemik Pilkada sabu raijua: putusan mahkamah konstitusi menjaga demokrasi dan keadilan*”